

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM, BUDAYA, DAN BUATAN DI KABUPATEN ENREKANG

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF NATURAL, CULTURAL, AND ARTIFICIAL TOURISM IN ENREKANG REGENCY

Reski Muliana^{1,*}, An Ras Try Astuti², Adhitia Pahlawan Putra³

^{1,2,3} Program Studi Pairwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare

** Penulis Korespondensi:*

E-mail: reskimuliana@iainpare.ac.id*

Abstract

Tourism has become a strategic sector in driving local economic growth, yet its development in rural regions often faces structural and institutional constraints. This study investigates the role of the Youth, Sports, and Tourism Office (Dispopar) in developing nature, cultural, and artificial tourism in Enrekang Regency, South Sulawesi, Indonesia. Employing a qualitative descriptive design with a phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving government officials and visitors. The findings reveal three tourism clusters directly managed by Dispopar: Lewaja Natural Spring (nature-based), Bambapuung Villa (cultural-based), and Latimojong Villa (artificial-based). Tourism development is supported by local natural resources, cultural traditions, and human capital; however, it is hindered by limited funding, remote geographic location, and land ownership conflicts. Dispopar's role is multifaceted: as regulator through policy enforcement, as facilitator by conducting awareness campaigns and capacity-building programs, and as promoter through festivals and cultural events. This study contributes to the literature by integrating the dynamics of institutional roles with local tourism governance, highlighting the intersection of nature, culture, and built environment in regional tourism development. Practically, the findings suggest that sustainable collaboration between government, communities, and private actors is essential to optimize tourism potential in rural Indonesia.

Keywords: *local government; tourism development; Enrekang Regency*

Abstrak

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah, namun pengembangannya di wilayah pedesaan sering menghadapi kendala. Penelitian ini menganalisis peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fenomenologi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terhadap aparat pemerintah serta wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga objek wisata utama yang dikelola Dispopar, yaitu Permandian Alam Lewaja (wisata alam), Villa Bambapuung (wisata budaya), dan Villa Latimojong (wisata buatan). Faktor pendukung pengembangan meliputi potensi alam, tradisi budaya, dan sumber daya manusia lokal, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan dana, akses geografis, dan konflik kepemilikan lahan. Peran Dispopar terlihat dalam tiga aspek: regulator melalui kebijakan dan aturan, fasilitator melalui sosialisasi sadar wisata serta pelatihan, dan promotor melalui festival budaya dan event massenrempulu. Penelitian ini berkontribusi pada literatur tata kelola pariwisata lokal dan memberikan

implikasi praktis perlunya kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mengoptimalkan potensi pariwisata berkelanjutan di daerah pedesaan Indonesia.

Kata Kunci: pemerintah daerah; pengembangan pariwisata; Kabupaten Enrekang

1. Pendahuluan

Pariwisata telah menjadi sektor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, terutama di kawasan pedesaan yang kaya potensi alam dan budaya. Di Indonesia, pengembangan desa wisata terbukti mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Contohnya, Desa Pujonkidul di Malang berhasil mengembangkan pariwisata berbasis *BUMDes* dan melibatkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) secara efektif dalam pengelolaan destinasi (Susanti et al., 2022). Pemerintah daerah juga berperan penting melalui penyusunan kebijakan strategis dan pembangunan kerjasama jangka panjang dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjadikan pariwisata sebagai instrumen pembangunan lokal (Zainuddin et al., 2023).

Namun, literatur sebelumnya masih banyak menitikberatkan pada peran pemerintah pusat atau studi di destinasi berskala besar. Penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pedesaan masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar kajian cenderung parsial, misalnya hanya menyoroti aspek promosi atau infrastruktur, tanpa menggali peran kelembagaan secara menyeluruh. Padahal, teori regionalisme baru menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan lokal, partisipasi masyarakat, dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mendorong ekonomi berbasis pariwisata di kawasan pedesaan (Zulkarnain, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) dalam pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan di Kabupaten Enrekang. Studi ini berfokus pada identifikasi jenis objek wisata yang dikelola, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta strategi kelembagaan yang dijalankan Dispopar. Dengan pendekatan kualitatif fenomenologi, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam interaksi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan wisatawan dalam tata kelola pariwisata.

Kontribusi utama artikel ini adalah menawarkan pemahaman integratif mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata pedesaan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang *tourism governance* dengan menekankan peran regulator, fasilitator, dan promotor. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain di Indonesia maupun negara berkembang untuk merancang strategi pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal dan kolaborasi multi-pihak.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi secara mendalam peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti memahami pengalaman subjektif aktor kelembagaan dan wisatawan dalam konteks sosial-budaya yang spesifik (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Enrekang, sebuah daerah yang memiliki potensi pariwisata alam, budaya, dan buatan yang dikelola langsung oleh Dispopar, seperti Permandian Alam Lewaja, Villa Bambapuang, dan Villa Latimojong. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan keberagaman jenis destinasi serta keterlibatan pemerintah daerah dalam tata kelola pariwisata (Miles et al., 2019).

Partisipan penelitian terdiri dari 20 informan, meliputi 10 aparatur Dispopar dan 10 wisatawan. Aparatur dipilih berdasarkan peran strategis mereka dalam bidang pemasaran, pengembangan destinasi, kepemudaan, dan olahraga. Wisatawan dipilih melalui teknik purposive sampling untuk memperoleh perspektif pengguna layanan wisata. Teknik pengumpulan data mencakup observasi partisipatif, wawancara mendalam tak terstruktur, serta dokumentasi arsip dan foto lapangan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengikuti model Miles dan Huberman (Miles et al., 2019). Uji keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, member check, serta audit trail untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Objek Wisata yang Dikelola Dispopara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Enrekang mengelola tiga objek wisata utama, yaitu:

1. Permandian Alam Lewaja, yang memanfaatkan potensi sumber air alami sebagai daya tarik wisatawan.
2. Villa Bambapuang, yang menonjolkan panorama Gunung Bambapuang sekaligus menjadi ikon wisata budaya.
3. Villa Latimojong, yang menghadirkan fasilitas buatan untuk mendukung wisata keluarga dan edukasi.



Gambar 1. Permandian Alam Lewaja

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024



Gambar 2. Villa Bambapuang

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024



Gambar 3. Villa Latimojong

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024

Objek wisata ini mewakili tiga kategori wisata yang berbeda, yaitu alam, budaya, dan buatan. Temuan ini menegaskan bahwa strategi Dispopar tidak hanya berfokus pada kekayaan alam, tetapi juga pada pemanfaatan budaya lokal dan penyediaan fasilitas buatan.

3.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Enrekang dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat.

Tabel 1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pariwisata Enrekang

No	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Potensi alam yang melimpah	Dana terbatas
2	Tradisi budaya masyarakat	Akses geografis sulit dijangkau
3	Keterlibatan sumber daya manusia	Konflik kepemilikan lahan

Sumber: Hasil Wawancara, 2024

Dari tabel di atas (lihat Tabel 1), dapat dipahami bahwa dukungan utama berasal dari keberlimpahan sumber daya alam, tradisi budaya yang masih terjaga, dan partisipasi masyarakat melalui Pokdarwis. Sementara itu, faktor penghambat yang menonjol adalah keterbatasan dana pemerintah daerah, lokasi geografis yang cukup sulit diakses, serta persoalan kepemilikan lahan yang belum terselesaikan.

3.1.3 Peran Dispopar dalam Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peran Dispopar dalam pengembangan pariwisata dapat dikategorikan ke dalam tiga fungsi utama:

1. Sebagai Regulator
 - a. Menyusun aturan dan kebijakan terkait pengelolaan destinasi wisata.
 - b. Mengawasi pemanfaatan lahan wisata untuk mencegah konflik kepemilikan.
 - c. Menetapkan standar pelayanan wisata.

2. Sebagai Fasilitator

- a. Melaksanakan sosialisasi *sadar wisata* kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pelatihan mitigasi bencana di kawasan wisata.
- c. Memberikan pelatihan bagi pemandu wisata (tour guide).

3. Sebagai Promotor

- a. Menyelenggarakan event budaya seperti Festival Massenrempulu.
- b. Melibatkan UMKM dalam kegiatan pariwisata.
- c. Melakukan promosi digital untuk memperkenalkan destinasi.

Untuk memperkuat temuan, berikut disajikan hasil coding wawancara dari 20 informan yang terdiri atas pejabat Dispapar dan wisatawan.

Tabel 2. Ringkasan Coding Wawancara

Kategori Utama	Subkategori	Indikator	Contoh Kutipan Informan
Potensi Wisata	Wisata Alam	Sumber daya alam sebagai daya tarik utama	"Air di Permandian Lewaja jernih dan jadi daya tarik utama wisatawan." (Informan 3)
	Wisata Budaya	Festival budaya sebagai atraksi tambahan	"Festival Massenrempulu mampu mengangkat budaya." (Informan 7)
	Wisata Buatan	Fasilitas modern untuk wisata keluarga	"Villa Latimojong jadi alternatif wisata keluarga." (Informan 8)
Faktor Pendukung	Dukungan Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam usaha wisata	"Masyarakat mendukung karena pariwisata membuka peluang usaha." (Informan 5)
Faktor Penghambat	Dana	Anggaran terbatas	"Dana dari pemerintah terbatas, fasilitas belum maksimal." (Informan 2)
	Geografis	Lokasi sulit dijangkau	"Menuju Latimojong butuh waktu lama karena jalan rusak." (Informan 6)
	Sengketa Lahan	Konflik kepemilikan lahan	"Masalah lahan sering menghambat pembangunan." (Pejabat Dispapar 2)
Peran Dispapar	Regulator	Kebijakan dan pengawasan tata kelola	"Kami membuat aturan agar lahan wisata tidak disalahgunakan." (Pejabat Dispapar 1)

	Fasilitator	Pelatihan dan sosialisasi	"Ada pelatihan pemandu wisata agar masyarakat bisa terlibat." (Pejabat Dispopar 4)
	Promotor	Event budaya dan promosi wisata	"Setiap tahun kami adakan Festival Budaya untuk menarik wisatawan." (Pejabat Dispopar 6)

Sumber: Data Wawancara, 2024

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispopar Kabupaten Enrekang mengelola tiga kategori objek wisata utama: alam (Permandian Alam Lewaja), budaya (Villa Bambapuang), dan buatan (Villa Latimojong). Pengembangan pariwisata ditopang oleh potensi alam dan budaya lokal, serta dukungan masyarakat, tetapi terkendala keterbatasan dana, akses geografis yang sulit, dan konflik kepemilikan lahan. Dispopar memainkan tiga fungsi utama, yakni sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan, sebagai fasilitator melalui sosialisasi dan pelatihan, serta sebagai promotor melalui festival dan kegiatan promosi budaya.

Temuan ini sejalan dengan teori peran sosial yang dikemukakan Soekanto (2017), bahwa peran dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu atau lembaga dalam suatu sistem sosial. Dispopar menjalankan fungsi regulatif, fasilitatif, dan promotif sebagai wujud implementasi kebijakan daerah. Selain itu, hasil ini memperkuat kerangka *tourism governance* dari UNWTO (2018), yang menekankan peran pemerintah dalam menciptakan regulasi, menyediakan fasilitas, dan mendorong promosi destinasi. Dengan demikian, tata kelola pariwisata di Enrekang mencerminkan model *multi-actor governance*, di mana pemerintah daerah menjadi katalis utama dalam menghubungkan masyarakat, sektor swasta, dan wisatawan.

Hasil penelitian ini mendukung studi Susanti et al. (2022) di Desa Pujonkidul yang menegaskan pentingnya dukungan masyarakat lokal melalui Pokdarwis untuk keberlanjutan wisata. Namun, berbeda dengan penelitian Zainuddin et al. (2023) yang menyoroti kolaborasi antar pemerintah daerah di kawasan perkotaan, penelitian ini memperlihatkan bahwa kendala terbesar di daerah pedesaan justru terletak pada keterbatasan dana dan infrastruktur. Selain itu, temuan ini memperluas kajian Zulkarnain (2023) tentang regionalisme baru dengan menambahkan dimensi institusional, di mana Dispopar tidak hanya sebagai regulator kebijakan tetapi juga sebagai fasilitator penguatan kapasitas SDM.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan tiga fungsi peran pemerintah daerah (regulator, fasilitator, promotor) ke dalam kerangka tata kelola pariwisata lokal. Model ini dapat menjadi acuan untuk memahami bagaimana pariwisata pedesaan dapat dikembangkan secara berkelanjutan melalui interaksi aktor kelembagaan. Secara praktis, temuan penelitian menegaskan perlunya peningkatan pendanaan, perbaikan aksesibilitas, serta penyelesaian masalah kepemilikan lahan untuk mendukung pengembangan wisata di Enrekang. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan optimalisasi promosi digital dapat menjadi strategi jangka panjang untuk memperluas daya tarik pariwisata lokal di tingkat nasional maupun internasional.

4. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Enrekang dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam, tradisi budaya, dan keterlibatan masyarakat sebagai faktor pendukung utama. Namun, keterbatasan dana, akses geografis yang sulit, serta konflik kepemilikan lahan masih menjadi tantangan yang signifikan. Dalam konteks tersebut, Dispopar berperan strategis melalui tiga fungsi utama: sebagai regulator yang menetapkan kebijakan, sebagai fasilitator yang memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi, serta sebagai promotor yang mendorong promosi wisata melalui festival budaya dan event lokal. Secara teoretis, temuan ini memperkaya literatur tentang *tourism governance* dengan menekankan integrasi peran kelembagaan pemerintah daerah dalam konteks pariwisata pedesaan. Model peran yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan kerangka analitis untuk memahami dinamika pengelolaan wisata berbasis potensi lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pendanaan, pembangunan infrastruktur, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas untuk mengoptimalkan potensi wisata di Enrekang secara berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup geografis yang terbatas pada tiga objek wisata di Kabupaten Enrekang, sehingga generalisasi hasil masih perlu diuji di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian ke wilayah dengan karakteristik pariwisata berbeda atau mengintegrasikan metode kuantitatif untuk menilai dampak ekonomi dan sosial dari tata kelola pariwisata lokal.

Referensi

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Susanti, D., Widiyanti, E., & Farida, I. (2022). Village-owned enterprises and sustainable tourism development: Case study of Pujonkidul, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(3), 861–870. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170311>
- UNWTO. (2018). *Tourism governance for the 2030 agenda*. World Tourism Organization.
- Zainuddin, M., Syamsuddin, R., & Pramono, T. (2023). Local government collaboration strategies in rural tourism development in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 7(1), 9290. <https://doi.org/10.24294/jipd.v7i1.9290>
- Zulkarnain, I. (2023). New regionalism and rural tourism economy: The role of local policies in Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development*, 12(2), 45–59.